

Nama : Nida Yasmin Sofiyah

NPM : 2313031026

Kelas : A

Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan

Ujian Akhir Semester

Soal 1. Efisiensi Anggaran Pendidikan

Kasus:

Pemerintah Kabupaten A mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, sedangkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan media pembelajaran digital masih sangat terbatas. Setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan.

Pertanyaan:

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.
2. Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia. Berikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Jawaban:

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.

Kasus Kabupaten A menunjukkan bahwa besarnya anggaran pendidikan belum tentu menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Dari perspektif ekonomi pendidikan, kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya efisiensi internal, yaitu ketika peningkatan input pendidikan belum mampu menghasilkan output pendidikan yang optimal. Dari sisi efisiensi

internal, penggunaan anggaran belum optimal karena sebagian besar dana difokuskan pada pembangunan gedung sekolah, sedangkan investasi pada peningkatan kualitas guru, pelatihan, dan media pembelajaran masih terbatas. Padahal faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa. Terbukti bahwa setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah memang meningkat karena akses pendidikan menjadi lebih baik. Namun, kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa output pendidikan yang dihasilkan belum sebanding dengan besarnya input yang digunakan. Dari sisi efisiensi eksternal, pendidikan seharusnya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi maupun dunia kerja. Karena kualitas hasil belajar belum meningkat secara signifikan, maka kontribusi pendidikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia juga belum optimal. Dengan demikian, baik efisiensi internal maupun eksternal dalam kasus ini masih perlu ditingkatkan.

2. Dampak kebijakan terhadap kualitas sumber daya manusia dan rekomendasi kebijakan.

Kebijakan yang terlalu berorientasi pada pembangunan fisik dapat menyebabkan peningkatan kuantitas pendidikan tanpa diikuti peningkatan kualitas. Dalam jangka panjang, lulusan yang dihasilkan mungkin memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi tetapi belum tentu memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan kerja. Sebagai contoh, siswa dapat menikmati fasilitas gedung yang lebih baik, tetapi jika kualitas pembelajaran tidak meningkat maka kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan mereka tetap terbatas. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan belum maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu menerapkan pengelolaan anggaran yang lebih seimbang. Sebagian dana perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, penyediaan media pembelajaran yang inovatif, serta evaluasi hasil belajar secara berkala. Dengan demikian, anggaran pendidikan tidak hanya meningkatkan akses pendidikan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas lulusan secara nyata.

Soal 2. Ketimpangan Akses Pendidikan

Kasus:

Sekolah di wilayah perkotaan memiliki laboratorium lengkap, akses internet cepat, dan guru profesional. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru, fasilitas minim, dan keterbatasan teknologi. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa jauh lebih rendah dibandingkan siswa di kota.

Pertanyaan:

1. Jelaskan bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut.
2. Analisis dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan.

Usulkan solusi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Jawaban:

1. Ketimpangan pendidikan dalam kasus ini terlihat dari adanya perbedaan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas antara siswa di perkotaan dan pedesaan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya educational inequality atau ketidakmerataan akses pendidikan yang masih terjadi antarwilayah. Sekolah di perkotaan memiliki laboratorium lengkap, akses internet yang memadai, serta tenaga pendidik yang lebih profesional. Sebaliknya, sekolah di pedesaan masih menghadapi keterbatasan guru, fasilitas belajar, dan teknologi pendukung pembelajaran. Perbedaan tersebut menyebabkan kualitas proses pembelajaran menjadi tidak merata. Siswa di kota memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan kemampuan akademik maupun keterampilan teknologi, sedangkan siswa di desa menghadapi berbagai hambatan dalam proses belajar. Akibatnya, hasil ujian siswa di pedesaan cenderung lebih rendah dibandingkan siswa di perkotaan.
2. Dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan
Ketimpangan pendidikan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi dalam jangka panjang. Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap produktivitas dan pendapatan seseorang. Apabila kualitas pendidikan yang diterima berbeda, maka kualitas tenaga kerja yang dihasilkan juga akan berbeda. Dalam kondisi ini, siswa dari daerah pedesaan

berpotensi memiliki peluang kerja yang lebih rendah dibandingkan siswa dari daerah perkotaan. Akibatnya, kesenjangan pendapatan antarwilayah dapat semakin melebar. Selain itu, pembangunan ekonomi daerah juga menjadi tidak merata karena daerah yang memiliki kualitas pendidikan rendah akan mengalami kesulitan menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Ketimpangan tersebut juga dapat mendorong urbanisasi karena masyarakat desa cenderung berpindah ke kota untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Jika berlangsung terus-menerus, hal ini dapat memperbesar ketimpangan pembangunan antarwilayah.

3. Usulan solusi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pendidikan

Pemerintah perlu menerapkan kebijakan pemerataan pendidikan secara menyeluruh. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan distribusi guru berkualitas ke daerah pedesaan melalui pemberian insentif dan fasilitas pendukung. Selain itu, pembangunan sarana pendidikan dan akses internet di daerah terpencil juga perlu menjadi prioritas. Pemanfaatan teknologi pendidikan dapat digunakan untuk menghubungkan sekolah di desa dengan sumber belajar yang lebih luas. Program pelatihan guru, bantuan sarana pembelajaran, dan kerja sama antarsekolah juga dapat membantu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan. Dengan pemerataan sumber daya pendidikan, kesempatan siswa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas akan menjadi lebih adil dan merata.

Soal 3. Pengangguran Terdidik

Kasus:

Jumlah lulusan perguruan tinggi di Kota B meningkat setiap tahun. Namun, banyak lulusan menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya. Dunia industri menilai kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pertanyaan:

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital.
2. Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut.

Berikan rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan.

Jawaban:

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital
Menurut teori human capital, pendidikan merupakan investasi yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kemampuan individu sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Namun, pada kasus Kota B terjadi kondisi di mana jumlah lulusan perguruan tinggi meningkat, tetapi banyak yang belum terserap oleh pasar kerja. Salah satu penyebabnya adalah adanya skill mismatch, yaitu ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri dan pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh lebih banyak berorientasi pada aspek teoritis, sedangkan dunia kerja membutuhkan kemampuan praktis dan keterampilan yang spesifik. Selain itu, pertumbuhan jumlah lulusan yang lebih cepat dibandingkan penciptaan lapangan kerja juga menjadi faktor yang memperbesar pengangguran terdidik. Akibatnya, sebagian lulusan harus bekerja di luar bidang studinya atau bahkan menganggur.
2. Hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut
Pendidikan dan pasar kerja memiliki hubungan yang sangat erat karena pendidikan berfungsi menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri. Pada kasus ini terlihat adanya kesenjangan antara output pendidikan dengan permintaan tenaga kerja. Perguruan tinggi menghasilkan banyak lulusan, tetapi kompetensi yang dimiliki belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya, perusahaan kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai, sedangkan lulusan kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja belum berjalan secara selaras.
3. Rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan
Peningkatan relevansi lulusan dapat dilakukan melalui penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri. Perguruan tinggi perlu melibatkan dunia usaha dan dunia industri dalam penyusunan kurikulum agar kompetensi yang diajarkan lebih sesuai dengan perkembangan pasar kerja. Program magang, praktik kerja lapangan, dan sertifikasi kompetensi juga perlu

diperluas agar mahasiswa memperoleh pengalaman nyata sebelum lulus. Selain itu, pengembangan keterampilan digital, komunikasi, dan kemampuan problem solving perlu mendapat perhatian lebih besar. Melalui langkah-langkah tersebut, lulusan akan memiliki kompetensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sehingga tingkat pengangguran terdidik dapat dikurangi.

Soal 4. Kenaikan Biaya Pendidikan

Kasus:

Sebuah universitas swasta menaikkan uang kuliah sebesar 25% untuk meningkatkan fasilitas kampus dan layanan akademik. Kebijakan tersebut mendapat protes dari mahasiswa karena dinilai memberatkan keluarga berpenghasilan rendah.

Pertanyaan:

1. Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat.
2. Jelaskan dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.
3. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya

Jawaban:

1. Analisis berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat

Dalam ekonomi pendidikan, pendidikan tinggi sering dikategorikan sebagai quasi public good (barang semi publik) karena memberikan manfaat langsung kepada individu sekaligus menghasilkan manfaat sosial bagi masyarakat secara luas. Sebagai barang privat, pendidikan memberikan manfaat langsung kepada individu berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan peluang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Sebagai barang publik, pendidikan juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi. Kenaikan biaya kuliah sebesar 25% menunjukkan bahwa universitas berupaya meningkatkan

kualitas layanan dan fasilitas akademik. Namun, kebijakan tersebut berpotensi membatasi akses pendidikan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai barang privat karena manfaatnya juga dirasakan oleh masyarakat secara luas.

2. Dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan

Dari sisi sosial, kenaikan biaya pendidikan dapat memperbesar kesenjangan akses pendidikan antara kelompok ekonomi atas dan kelompok ekonomi bawah. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu berisiko mengalami kesulitan dalam melanjutkan studi atau bahkan terpaksa menghentikan pendidikan. Dari sisi ekonomi, beban pengeluaran rumah tangga menjadi meningkat. Sebagian keluarga mungkin harus mengurangi konsumsi kebutuhan lain atau mencari sumber pembiayaan tambahan untuk memenuhi biaya kuliah. Kondisi ini dapat menimbulkan tekanan ekonomi yang cukup besar, terutama bagi keluarga dengan pendapatan terbatas.

3. Pemerintah perlu melakukan intervensi untuk menjaga akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Intervensi tersebut dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, subsidi pendidikan, maupun pengawasan terhadap kebijakan kenaikan biaya kuliah. Intervensi pemerintah penting karena pendidikan memiliki manfaat sosial yang luas dan berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, akses pendidikan berpotensi hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Soal 5. Digitalisasi Pembelajaran

Kasus:

Pasca pandemi, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Namun, siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan membeli perangkat dan kuota internet sehingga partisipasi belajar menurun.

Pertanyaan:

1. Analisis masalah tersebut menggunakan konsep biaya pendidikan dan opportunity cost.
2. Jelaskan dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan.

Berikan solusi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Jawaban:

1. Analisis menggunakan konsep biaya pendidikan dan opportunity cost
Digitalisasi pembelajaran memberikan berbagai manfaat dalam proses belajar, tetapi juga menimbulkan biaya tambahan bagi peserta didik. Keluarga harus menyediakan perangkat elektronik seperti telepon pintar atau laptop serta biaya kuota internet untuk mendukung kegiatan belajar. Dari perspektif opportunity cost, pengeluaran untuk kebutuhan pembelajaran digital dapat menyebabkan keluarga mengorbankan kebutuhan lain yang juga penting. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya tersebut menjadi beban tambahan yang cukup berat sehingga dapat menghambat partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.
2. Dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan
Kesenjangan digital (digital divide) terjadi ketika tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi, perangkat pembelajaran, dan jaringan internet yang memadai. Kondisi ini menyebabkan kualitas pembelajaran yang diterima siswa menjadi berbeda-beda. Siswa yang memiliki perangkat memadai dan jaringan internet yang stabil dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Sebaliknya, siswa yang tidak memiliki fasilitas tersebut akan mengalami kesulitan mengakses materi, mengikuti diskusi, maupun mengerjakan tugas. Akibatnya, prestasi belajar antar siswa menjadi semakin tidak merata dan risiko learning loss meningkat.
3. Solusi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut
Untuk mengurangi kesenjangan digital, pemerintah perlu memperluas pembangunan infrastruktur internet hingga ke daerah terpencil. Selain itu, bantuan perangkat pembelajaran dan subsidi kuota internet perlu diberikan kepada siswa yang membutuhkan. Sekolah juga dapat menyediakan pusat belajar berbasis teknologi yang dapat diakses oleh siswa secara bergantian.

Dengan adanya dukungan tersebut, proses digitalisasi pembelajaran dapat berjalan lebih merata sehingga seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.